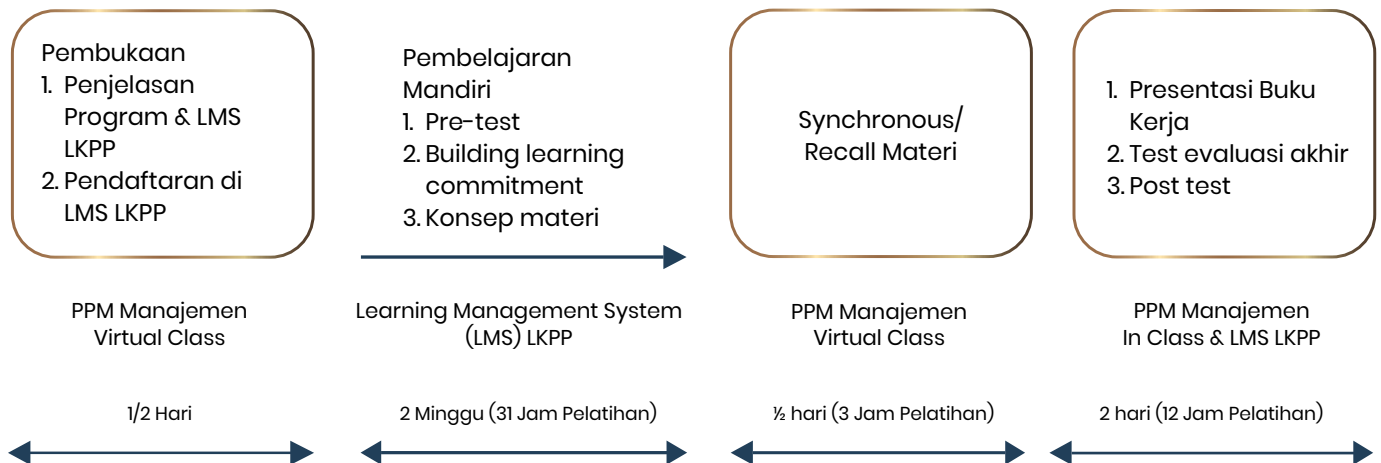


PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TIPE C

Government Procurement of Goods/Services For Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Type C



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 dan Perubahannya No. 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, Pasal 74 A menyatakan: Semua sumber daya manusia pengadaan barang/jasa wajib memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa. Dalam Perpres tersebut disebutkan pula bahwa terdapat 9 (Sembilan) Pelaku Pengadaan, salah satu diantaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang wajib memiliki sertifikasi kompetensi.

Program Pelatihan Sertifikasi PPK Tipe C merupakan program kompetensi lanjutan level 2 yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

PPK Memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan negara, berwenang untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang /jasa. Oleh karenanya PPK harus memiliki kompetensi yang mumpuni guna menjamin pelaksanaan pengelolaan anggaran Lembaga/organisasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Regulation of the President of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 and its Amendments No. 12 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Government Goods/Services Procurement (PBJ), Article 74 A states: All human resources for the procurement of goods/services must have competence in the field of goods/services procurement. The President regulator also states that there are 9 (nine) Procurement Actors, one of whom is a Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) who is required to have competency certification.

The PPK Type C Certification Training Program is a level 2 advanced competency program designed to improve professionalism in the management of public procurement. designed to improve professionalism in the management of government procurement of goods and services.

PPK Has a strategic function in managing state finances, has the authority to make decisions and actions that result in budget spending and is responsible for the implementation of procurement goods/services. Therefore PPK must have qualified competence to ensure the implementation of budget management for institutions/organizations procuring goods/services in accordance with applicable regulations.

Topik :

1. Perencanaan PBJ meliputi: identifikasi kebutuhan dan penetapan PBJ, penyusunan spesifikasi teknis dan kerangka acuan kerja (KAK) jasa konsultasi perorangan, dan penyusunan perkiraan harga
2. Pengelolaan Kontrak PBJ meliputi: perumusan kontrak dalam bentuk SPK, pengendalian pelaksanaan kontrak, pekerjaan serah terima hasil PBJ, evaluasi kinerja penyedia.
3. Pengelolaan PBJ secara swakelola: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima pekerjaan PBJ.

Metode Program :

Metode program menggunakan Blended Learning yaitu kombinasi pembelajaran yang diawali dengan pembelajaran mandiri dalam LMS dilanjutkan dengan metode In-class/tatap muka.

Peserta Pelatihan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berasal baik dari Institusi pemerintah, BUMN, BUMD & BLU yang telah memiliki **Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa tingkat dasar atau Level 1**.

Peserta diharapkan membawa laptop

Subjects :

1. *PBJ planning including: identification of needs and determination of PBJ, preparation of technical specifications and terms of reference (TOR) for individual consulting services, and preparation of price estimates*
2. *PBJ Management Contracts including: contract for mulation in the form of SPK, control of contract implementation, handover of PBJ results, evaluation of provider performance.*
3. *Managing PBJ on a self-managed basis: planning, preparation, implementation, supervision and handover of PBJ work*

Program Method :

The program method uses Blended Learning, which is a combination of learning that begins with independent learning in the LMS followed by the in-class/face-to-face method.

Trainees :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) who come from both government institutions, BUMN, BUMD & BLU who already have a basic level or Level 1 Procurement of Goods/Services Certification

Participants are expected to bring a laptop.

SMART

IDR 5.000.000

Blended Learning